

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) PADA DESA BANYU TAJUN PANGKALAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Anil Azimi¹, Munawarah², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: azimianil2303@gmail.com

ABSTRAK

Melalui program PAMSIMAS, diharapkan masyarakat mampu memberikan perhatian utama pada kebutuhan air bersih dan sanitasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 13 orang. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah berjalan cukup baik, sebagaimana terlihat dari: kejelasan kebijakan sudah baik, adanya dukungan finansial sudah baik, dukungan sumber daya manusia belum baik, penilaian terhadap pencapaian standar belum baik, penilaian terhadap sasaran kebijakan sudah baik, sikap demokratis terhadap kelompok sasaran sudah baik, sikap antusias terhadap kelompok sasaran belum baik, koordinasi antar instansi sudah baik, komunikasi antar instansi sudah baik, lingkungan sosial sudah baik, dari segi ekonomi sudah baik, dan tidak ada unsur politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi, 1) Faktor pendukung Kebijakan Pamsimas yang di terapkan sudah jelas, Sasaran utama pamsimas untuk masyarakat desa Banyu Tajun Pangkalan, adanya dukungan finansial, Sasaran kebijakan dinilai sudah bagus, Sikap demokratis baik, Program pamsimas tidak ada unsur politik. 2) Faktor penghambat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan Pamsimas, kurangnya pengawasan Pamsimas, serta jumlah pengguna Pamsimas yang masih sedikit.

Kata Kunci : Implementasi, Pamsimas

ABSTRACT

The PAMSIMAS program aims to encourage the community to place greater emphasis on clean water and sanitation. This research adopts a qualitative methodology, utilizing interviews, observations, and documentation for data collection. The data were gathered using purposive sampling, involving a total of 13 participants. Findings from the study reveal that the implementation of the Community-Based Drinking Water and Sanitation Program (PAMSIMAS) in Banyu Tajun Pangkalan Village, Sungai Pandan Subdistrict, Hulu Sungai Utara Regency has been carried out fairly well. This is evident from the clear policies and adequate financial support, though the support from human resources and the evaluation of standard achievements remain insufficient, the enthusiastic attitude towards the target group is not good, coordination between agencies is good, communication between agencies is good, the social environment is good, in terms of economy it is good, and there are no political elements. Factors that influence, 1) Supporting factors The Pamsimas policy that is implemented is clear, The main target of Pamsimas for the Banyu Tajun Pangkalan village community, the financial support, The policy target is considered good, The democratic attitude is good, The Pamsimas program has no political elements. 2) Inhibiting factors include the lack of community participation in Pamsimas maintenance, lack of Pamsimas supervision, and the small number of Pamsimas users.

Keywords: Implementation, Pamsimas

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap individu untuk memperoleh air guna memenuhi kebutuhan pokok harian demi mendukung kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Air bersih pada hakikatnya merupakan kebutuhan esensial bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui program PAMSIMAS, yang

dirancang untuk menyediakan akses air bersih dan fasilitas sanitasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyediaan air bersih serta penanganan masalah sanitasi. Program ini terutama menasar masyarakat di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Dengan adanya PAMSIMAS, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh air bersih sekaligus memahami cara menjalani pola hidup bersih dan sehat, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar.

elalui program PAMSIMAS, diharapkan masyarakat dapat lebih memprioritaskan akses terhadap air bersih dan sanitasi, meskipun mereka berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, masyarakat tetap dapat memanfaatkan fasilitas air bersih demi mendukung keberlangsungan hidup mereka. Dengan demikian, derajat kesehatan masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan angka harapan hidup serta kualitas pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Pelaksanaan program PAMSIMAS ini sendiri telah diterapkan di Desa Banyu Tajun Pangkalan pada tahun 2018. Desa tersebut, yang terletak di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, menjadi salah satu penerima program nasional yang berfokus pada penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Namun berdasarkan hasil Observasi Penulis Implementasi Pamsimas (Program Nasional Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Pada Desa Banyu Tajun Pangkalan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dari jumlah Pengguna Pamsimas ada terdapat 38 Kepala keluarga termasuk yang menggunakan Pamsimas (Sumber Pengelola Pamsimas), Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga di Desa Banyu Tajun Pangkalan adalah 157 kepala Keluarga (sumber Gis. Disdukcapil. Kemendagri) data per 30 Juni 2024. Dari data tersebut disimpulkan bahwa masyarakat di desa Banyu tajun Pangkalan hanya 24,2 persen Kepala keluarga yang menggunakan Pamsimas dari pada yang menggunakan air sungai. Adapun hambatan dalam Pengelolaan Pamsimas diantaranya:

1. Dalam beberapa lokasi rumah, kendala teknis sering menjadi kendala utama dalam pelaksanaan PAMSIMAS. Penyaluran air yang sulit dijangkau ke berbagai rumah menjadi tantangan besar bagi Pengelola dan masyarakat pengguna pamsimas setempat. Kondisi ini menyebabkan Penyaluran PAMSIMAS berjalan lambat atau hasilnya tidak maksimal.
2. Masalah dalam pengelolaan PAMSIMAS di Desa tersebut adalah kurangnya pemeliharaan fasilitas yang sudah dibangun. Berdasarkan hasil observasi pengguna terdata mengalami masalah pada infrastruktur yang rusak karena minimnya usaha pemeliharaan. Seharusnya pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan sistem penyaluran air yang lancar. Adapun beberapa frekuensi pemeliharaan yang seharusnya dilakukan adalah pemeliharaan harian atau mingguan, pemeliharaan bulanan, dan pemeliharaan tahunan hal tersebut jarang dilakukan oleh para pengelola pamsimas karena tidak adanya alokasi dana atau perencanaan yang jelas tentang berapa biaya untuk perawatan, atau masyarakat kurang memiliki kemampuan teknis untuk memperbaiki fasilitas tersebut.
3. Kurangnya Pengawasan dalam Program Pamsimas, Meski PAMSIMAS melibatkan fasilitator yang bertugas melakukan pengawasan, dalam beberapa kasus, proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program masih kurang efektif. Akibatnya, program tidak dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, seperti rendahnya tingkat keamanan Pamsimas yang mengakibatkan rentannya terhadap pencurian alat-alat pamsimas seperti mesin pompa air, sehingga mengakibatkan permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan total 13 orang. Data yang terkumpul dianalisis melalui langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kredibilitas data diuji dengan cara memperpanjang durasi pengamatan, meningkatkan ketelitian, melakukan

triangulasi, member check, serta memanfaatkan bahan referensi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Pada Desa Banyu Tajun Pangkalan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam penelitian ini, digunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, sebagaimana dijelaskan oleh Azhari Aziz Samudra dan rekan-rekannya (2023:89-90) .

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Instrumen dan tujuan kebijakan perlu spesifik sehingga keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan atau program dapat diketahui pada akhir program.

a. Kejelasan Kebijakan

Kejelasan kebijakan berarti kebijakan ini jelas mengenai hal apa yang akan diterapkan, tahap pelaksanaan sebuah kebijakan adalah bagian akhir dari proses penyusunan atau perumusan aturan maupun kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, menunjukkan hasil yang cukup baik dalam hal kejelasan kebijakan. Program ini berfokus pada penyediaan fasilitas air bersih yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menerapkan gaya hidup bersih dan sehat sesuai dengan uu no 7 tahun 20004 pasal 5 dan dapat dilihat dari adanya tulisan pada tong-tong pamsimas yaitu Pamsimas Desa Banyu Tajun Pangkalan.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk., 2023: 89-90), yang mengidentifikasi sejumlah variabel yang dianggap memengaruhi implementasi serta kinerja kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan pada dasarnya merujuk pada apa yang ingin dicapai oleh suatu program atau kebijakan, baik yang bersifat konkret maupun abstrak, dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Tujuan dan kebijakan harus dirumuskan dengan jelas sehingga pada akhir pelaksanaannya, tingkat keberhasilan atau kegagalan program serta kebijakan tersebut dapat dievaluasi dengan mudah.

b. Sasaran Kebijakan

Menurut Wahab (2008:50), kelompok sasaran atau target group merujuk pada "orang-orang, komunitas, atau organisasi yang ingin dipengaruhi melalui sebuah kebijakan atau program yang diharapkan dapat membawa dampak tertentu.

Dari hasil wawancara, pengamatan, dan pencatatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan tersebut sudah tercapai dengan cukup baik, Program ini kelompok sasarannya adalah desa Banyu Tajun Pangkalan khususnya masyarakat (tiap keluarga) agar menjadikan pola hidup yang lebih sehat, dan berperan serta secara langsung dalam memberikan kontribusi, seperti melakukan pembayaran iuran setiap bulan yang disesuaikan dengan jumlah penggunaan air oleh setiap keluarga serta bukti daftar pengguna pamsimas yang aktif.

Penelitian ini sejalan dengan pandangan yang diajukan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan serta hasil dari kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh sebuah program atau kebijakan, baik itu dalam bentuk konkret maupun abstrak, serta dalam rentang waktu jangka pendek, menengah, atau panjang. Penting untuk memberikan perhatian khusus pada kejelasan petunjuk dan tujuan, agar pada akhir program dapat diukur sejauh mana keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan dan program yang dijalankan.

2. Sumber daya

Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan, hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia).

a. Adanya dukungan finansial

Finansial memang erat kaitannya dengan uang serta masalah finansial, maka itu berarti masalah keuangan. Masalah ini meliputi apa saja yang berhubungan dengan uang.

Menurut hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan dana yang memadai, masyarakat yang tertarik hanya perlu membayar sebesar Rp. 2.000 per meter kubik. Biaya ini lebih terjangkau dibandingkan dengan tarif air yang dikenakan oleh perusahaan air minum (PDAM), dan dana yang terkumpul digunakan kembali untuk pengelolaan sistem Pamsimas.

Penelitian ini sejalan dengan konsep yang diajukan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang menyatakan bahwa sumber daya mencakup dukungan finansial serta tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Pertanyaan utamanya adalah sejauh mana jumlah sumber daya (baik finansial maupun manusia) yang dibutuhkan agar kebijakan dapat terlaksana dengan optimal? Penilaian terhadap program dan kebijakan harus dapat memberikan penjelasan yang jelas dan efisien mengenai nilai dari sumber daya tersebut.

b. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia Yang Memadai

Sumber daya merujuk pada sejauh mana ketersediaan dana dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan suatu program atau kebijakan.

Melalui hasil dari wawancara, pengamatan, serta pencatatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat keberadaan dukungan dari sisi tenaga kerja yang tersedia yang memadai belum baik, karena tidak ada partisipasi dari masyarakat Desa Banyu Tajun Pangkalan dalam pengelolaan serta kondisi Pamsimas yang kurang terawat.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan pandangan yang diajukan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang menyatakan bahwa sumber daya mencakup besar dukungan finansial serta tenaga kerja untuk menjalankan suatu program atau kebijakan. Tantangan yang dihadapi adalah penentuan besarnya sumber daya (baik dari sisi finansial maupun sumber daya manusia) yang diperlukan untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program dan kebijakan harus dapat menjelaskan sejauh mana nilai efektivitasnya.

3. Karakteristik agen pelaksana (Kinerja)

Agen pelaksana tersebut meliputi misalnya kementerian, dinas, dan lembaga-lembaga terkait Evaluasi kebijakan adalah proses mengukur sejauh mana tujuan dan standar yang telah ditetapkan tercapai.

a. Penilaian terhadap pencapaian standar

Pencapaian standar adalah suatu standar atau patokan teknis yang lengkap, biasanya dalam bentuk dokumen formal, yaitu norma atau persyaratan yang menetapkan standar, metode, proses, atau praktik teknis atau teknologi yang seragam.

Melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap pencapaian standar masih belum memadai. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang belum berjalan secara efisien, sehingga dampaknya belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat rentannya pencurian alat-alat pamsimas seperti mesin pompa air, dan swadayaanya dirasa belum mampu untuk mengganti mesin pompa baru jika sewaktu waktu terjadinya pencurian yang hanya menggunakan rantai dan gembok yang kecil sehingga belum mencapai standar.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari aziz samudra, dkk. 2023:89-90) Kinerja politik adalah evaluasi terhadap tujuan politik yang ditetapkan pada awalnya.

b. Penilaian terhadap sasaran kebijakan

Tujuan dari kebijakan ini merupakan elemen krusial dalam perencanaan, yang bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil serta pengaturan sumber daya dalam pelaksanaan aktivitas atau operasi organisasi.

Melalui pengumpulan data dari wawancara dan pengamatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi terhadap pencapaian standar cukup baik, program PAMSIMAS Pencapaian sasaran sudah tercapai masyarakat sangat terbantu dengan adanya PAMSIMAS, sekaligus untuk mendapatkan akses air minum disaat musim kemarau.

Penelitian ini mendukung teori yang diajukan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang menyatakan bahwa kinerja kebijakan adalah sebuah evaluasi terhadap tujuan kebijakan yang telah ditentukan sejak awal.

4. Sikap pelaksana

Sikap diterima atau ditolaknya badan pelaksana mempunyai dampak besar terhadap berhasil atau tidaknya upaya yang dilakukan pemerintah.

a. Sikap demokratis terhadap kelompok sasaran

Demokrasi adalah sebuah sistem kehidupan yang menuntut adanya kesetaraan dalam hak dan tanggung jawab, serta memastikan setiap individu diperlakukan dengan adil di hadapan hukum.

Melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pandangan atau perilaku demokratis cukup baik, penerapan kebijakan semua diperlakukan sama tidak ada beda dan memusyawarahkan apapun dalam kebijakan.

Penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan konsep yang diajukan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk., 2023:89-90). Mereka mengemukakan bahwa perilaku dari pelaksana kebijakan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa aspek dari sikap para praktisi dapat mencerminkan seberapa terbuka, penuh semangat, dan peka mereka terhadap kelompok yang menjadi target kebijakan serta kondisi di sekitar mereka.

b. Sikap antusias terhadap kelompok sasaran

Demokrasi, dalam konteks keadilan, adalah sebuah prinsip hidup yang menekankan pada kesetaraan hak dan tanggung jawab serta perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara di mata hukum. Keadilan mencakup tindakan untuk memperjuangkan kebenaran dan mengikuti aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui analisis terhadap wawancara, observasi, serta dokumentasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap antusias terhadap kelompok sasaran belum baik, karena program ini yang menggunakan pamsimas masih sedikit seperti jumlah pengguna pamsimas yang sedikit dibandingkan jumlah penduduk dan dapat dilihat dari jumlah pengguna pamsimas dari RT 01 sampai RT 04 hanya berjumlah 38 KK (rumah) dari 457 KK

Penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90). Menurut teori tersebut, sikap para pelaksana dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Komponen-komponen sikap ini terlihat dalam seberapa demokratis, bersemangat, dan peka mereka terhadap kelompok yang menjadi target kebijakan serta lingkungan.

5. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Kesalahan yang tidak terlalu signifikan bisa diminimalisir apabila komunikasi yang baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan terjaga dengan baik.

a. Koordinasi antar instansi

Koordinasi adalah proses yang melibatkan berbagai pihak dalam suatu organisasi dengan posisi yang setara untuk mencapai tujuan bersama. Setiap pihak menyepakati peran dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan tugas atau

gangguan pada salah satu pihak.

"Melalui wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar lembaga berjalan dengan lancar, yang terbukti memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan program PAMSIMAS. Hal ini terlihat dari terbentuknya ikatan yang erat antara masyarakat dan pengelola, yang mencerminkan rasa kekeluargaan.

Penelitian ini sejalan dengan konsep yang diajukan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk., 2023:89-90) yang menyatakan bahwa komunikasi antar lembaga berfungsi sebagai prosedur yang telah diatur untuk mencapai tujuan dan target program. Komunikasi ini harus dijalankan dengan pedoman yang jelas, seperti frekuensi pertemuan rutin, serta penentuan tempat dan waktu. Selain itu, komunikasi antar organisasi juga mencakup kebutuhan untuk saling mendukung antara institusi yang terkait dengan kebijakan atau program, agar kelompok sasaran dapat memahami dan memikul tanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang ada.

b. Komunikasi Antar Instansi

Komunikasi antar instansi merujuk pada proses pengiriman dan penerimaan pesan dalam konteks organisasi, khususnya pemerintahan.

Setelah melakukan wawancara dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar pelaksana cukup baik, para pelaksana terutama pemerintah desa bekerja sama satu sama lain dan menjalin hubungan baik dalam penerapan atau menjalankan kebijakan PAMSIMAS.

Penemuan dalam studi ini sejalan dengan konsep yang diajukan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang menjelaskan bahwa komunikasi antar lembaga merujuk pada prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan serta hasil yang diinginkan dalam sebuah program.

6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik di sekitar suatu area dapat berperan penting dalam menentukan apakah kebijakan yang diterapkan akan berhasil atau tidak.

a. Pengaruh implementasi terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Perubahan perilaku yang terjadi pada individu atau kelompok sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Faktor-faktor seperti keluarga, teman, dan tempat tinggal memiliki peran besar dalam membentuk perilaku seseorang. Seseorang akan mencerminkan karakter dan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempatnya berada, sehingga lingkungan sosial yang positif dapat mendorong individu untuk berkembang menjadi lebih baik. Selain itu, lingkungan ekonomi mencakup kegiatan manusia yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa.

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan memberikan dampak positif terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik, secara sosial sangat berpengaruh karena menambah kedekatan satu sama lain, secara ekonomi membantu masyarakat kurang mampu namun tidak terdapat pengaruh pada politik.

Temuan dari studi ini sejalan dengan konsep yang diutarakan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang menyatakan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan sekitar dapat berperan penting dalam menentukan keberhasilan penerapan kebijakan.

b. Pengaruh Kebijakan terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hasil dari wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak positif yang signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik secara sosial sangat berpengaruh karena menambah kedekatan satu sama lain, secara ekonomi membantu masyarakat kurang mampu namun tidak terdapat pengaruh pada politik.

Penelitian ini mendukung pandangan yang disampaikan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang menyatakan bahwa faktor-faktor

sosial, ekonomi, dan politik di suatu lingkungan berperan penting dalam mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

1. Faktor Pendukung

a. Kebijakan Pamsimas yang diterapkan jelas

Dari analisis terhadap wawancara, observasi, dan dokumen yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Banyu Tajun, Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai kejelasan kebijakan cukup baik, kejelasan kebijakan dari program pamsimas adalah sebagai penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang berkualitas untuk masyarakat, Sebagai langkah untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok warga, serta untuk mengubah cara pandang dan kebiasaan masyarakat terkait dengan gaya hidup yang bersih dan sehat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 5 dan dapat dilihat dari adanya tulisan pada tong-tong pamsimas yaitu Pamsimas Desa Banyu Tajun Pangkalan.

"Penelitian ini sejalan dengan pandangan yang diajukan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang menyebutkan bahwa terdapat sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan efektivitas kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan mencerminkan tujuan yang ingin dicapai, baik yang bersifat konkret maupun abstrak, dalam berbagai periode waktu, seperti jangka pendek, menengah, maupun panjang, yang menjadi fokus suatu kebijakan atau program. Di akhir pelaksanaan program, tujuan dan sasaran kebijakan harus terlihat dengan jelas untuk mengevaluasi apakah kebijakan atau program tersebut berhasil atau tidak.

b. Sasaran utama dalam program pamsimas sudah jelas

Melalui hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai sasaran kebijakan cukup baik, Program ini kelompok sasarannya adalah desa Banyu Tajun Pangkalan khususnya masyarakat (tiap keluarga) agar menjadikan pola hidup yang lebih sehat, dan berpartisipasi secara rutin, seperti membayar iuran bulanan yang disesuaikan dengan jumlah pemakaian air setiap rumah tangga, serta menunjukkan bukti bahwa mereka terdaftar sebagai pengguna aktif Pamsimas.

Hasil dari studi ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90), yang menyarankan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan dan hasil dari kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan merupakan hal-hal yang hendak dicapai melalui suatu program, baik yang bersifat konkret maupun abstrak, dalam berbagai periode waktu, seperti jangka pendek, menengah, dan panjang. Perhatian khusus perlu diberikan pada kejelasan pedoman serta sasaran yang ingin dicapai, agar dapat diukur keberhasilan atau kegagalan kebijakan dan program di akhir pelaksanaannya.

c. Masyarakat selalu melakukan pembayaran setiap bulannya sesuai pemakaian air Pamsimas

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Banyu Tajun Pangkalan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, menunjukkan dukungan finansial yang memadai. Warga yang tertarik ikut serta dalam program ini dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000 per meter kubik, yang lebih terjangkau dibandingkan dengan tarif yang diterapkan oleh PDAM, yang membebankan biaya lebih tinggi kepada penggunanya, uang tersebut digunakan lagi untuk pengelolaan PAMSIMAS, serta ada anggaran dari pemerintah untuk pembangunan PAMSIMAS di Desa Banyu Tajun Pangkalan yang kemudian biaya

perawatanya di kelola oleh pengelola PAMSIMAS.

Penelitian ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari Aziz Samudra, dkk. 2023:89-90) yang menyatakan bahwa sumber daya mengacu pada besarnya dukungan finansial serta tenaga kerja yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Pertanyaannya adalah seberapa penting nilai dari sumber daya tersebut (baik berupa finansial maupun SDM) dalam mewujudkan kebijakan yang efektif? Proses evaluasi terhadap suatu program atau kebijakan seharusnya dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai nilai-nilai tersebut.

d. Sasaran kebijakan pamsimas dinilai sudah bagus

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap pencapaian standar cukup baik, program PAMSIMAS pencapaian sasaran sudah tercapai masyarakat sangat terbantu dengan adanya PAMSIMAS, sekaligus untuk mendapatkan akses air minum disaat musim kemarau.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari aziz samudra, dkk. 2023:89-90) Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap sasaran kebijakan yang telah ditetapkan diawal.

e. Sikap demokratis antar pengelola dan pengguna Pamsimas dinilai baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sikap demokratis cukup baik, penerapan kebijakan semua diperlakukan sama tidak ada beda dan memusyawarahkan apapun dalam kebijakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari aziz samudra, dkk. 2023:89-90). Sikap pelaksana menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam Implementasi Kebijakan. Sikap pelaksana ditekankan terutama pada sikap demokratis dan antusias dalam hubungannya dengan kelompok sasaran dan lingkungan.

f. Program pamsimas tidak ada unsur politik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pengaruh Implementasi terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan politik cukup baik secara sosial sangat berpengaruh karena menambah kedekatan satu sama lain, secara ekonomi membantu masyarakat kurang mampu namun tidak terdapat pengaruh pada politik,

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (Azhari aziz samudra, dkk. 2023:89-90) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik menunjukkan bahwa konteks wilayah implementasi dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan Pamsimas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Penyediaan Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Pada Desa Banyu Tajun Pangkalan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai belum baik, karena tidak ada partisipasi dari masyarakat Desa Banyu Tajun Pangkalan dalam pengelolaan PAMSIMAS.

b. Kurangnya Pengawasan Pamsimas sehingga belum bermanfaat secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Penyediaan Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Pada Desa Banyu Tajun Pangkalan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai penilaian terhadap pencapaian standar belum baik, karena pengelolaannya belum optimal sehingga belum bermanfaat secara maksimal untuk masyarakat rentannya pencurian alat-alat pamsimas seperti mesin pompa air, dan swadayaanya dirasa belum mampu untuk mengganti mesin pompa baru jika sewaktu waktu terjadinya pencurian yang hanya menggunakan rantai dan gembok

yang kecil sehingga belum mencapai standar.

c. Jumlah Pengguna Pamsimas yang masih sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Pada Desa Banyu Tajun Pangkalan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai sikap antusias terhadap kelompok sasaran Belum antusias karena program ini yang menggunakan pamsimas masih sedikit seperti jumlah pengguna pamsimas yang sedikit dibandingkan jumlah penduduk dan dapat dilihat dari jumlah pengguna pamsimas dari RT 01 sampai RT 04 hanya berjumlah 38 KK (rumah) dari 457 KK.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Pada Desa Banyu Tajun Pangkalan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah terimplementasi dengan cukup baik hal ini dapat dilihat dari: kejelasan kebijakan sudah baik, adanya dukungan finansial sudah baik, dukungan sumber daya manusia belum baik, penilaian terhadap pencapaian standar belum baik, penilaian terhadap sasaran kebijakan sudah baik, sikap demokratis terhadap kelompok sasaran sudah baik, sikap antusias terhadap kelompok sasaran belum baik, koordinasi antar instansi sudah baik, komunikasi antar instansi sudah baik, lingkungan sosial sudah baik, dari segi ekonomi sudah baik, dan tidak ada unsur politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi, 1) Faktor pendukung Kebijakan Pamsimas yang di terapkan sudah jelas, Sasaran utama pamsimas untuk masyarakat desa Banyu Tajun Pangkalan, adanya dukungan finansial, Sasaran kebijakan dinilai sudah bagus, Sikap demokratis baik, Program pamsimas tidak ada unsur politik. 2) Faktor penghambat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan Pamsimas, kurangnya pengawasan Pamsimas, serta jumlah pengguna Pamsimas yang masih sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto.S,2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rienika Cipta

Asep Saepulloh, Mohammad Adeyadi.2019. *Jurnal Manajemen Teknik Informatika*, 03, 102-110.

Asep Saepulloh.2019. Aplikasi Scanner Berbasis Android Untuk Menampilkan Data Id Card Menggunakan Barcode. *Jurnal Manajemen Dan Teknik Informatika*,102

Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ainah, N. *et al.* (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EEFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 6(2), pp. 152–159.

Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.

Fatimah, F. and Ghalib, S. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI

- KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administtraus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) 'Teaching practice program in college of education—creativity, emotional intelligence and locus of control', *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.
- Jumaidi, J. (2025) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.
- Junaidi, J. (2025) 'INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.
- Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.
- Orbawati, O. (2025) 'KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.
- Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.
- Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.
- Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.

- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.
- Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20210503.16>.
- Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Idara Balad*, 6(1), pp. 189–193.
- Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.
- Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.
- Goerge C Edward III.1980. Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). Turhindyani
- Grindle, M. S. 2017. *Politics And Policy Implementation in The Third World*: New Edition. Princeton University Press.
- Larasati Retno Palup.2018. *Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Malang*. (Skripsi). Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik
- Leo.Agustino.2017. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukmad Offset.
- Luthans, F. 2015. *Organizational Behavior*. New York: Mcgraw-Hill.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mangkuprawira, Sjafrî., 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mangkuprawira, Sjafrî., 2019. - Horison Bisnis, *Manajemen Dan Sumber Daya Manusia*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2009. *Human Resource Management: Manajemen*
- Moh. Muafi Bin Thohir, Syamsul Hadi HM.2020. Implementasi Komunikasi Organisasi Dalam Kegiatan Dakwah Untuk Memperbaiki Diri Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*,6,163-168
- Moh. Muafi.Bin Thohir , Syamsul Hadi HM. 2020. Implementasi Komunikasi Organisasi Dalam Kegiatan Dakwah Untuk Memperbaiki Diri Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang, 6, 163-176.
- Phuk Tjilen,Alexander.2019. *Kebijakan Publik*. Bandung. Nusa Media



Pranomo,Joko.2020.Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan.Solo:Percetakan Kurnia

Rahmah,Miftahur.2019.*Pengawasan Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Naumbai, Kabupaten Kampar* (Skripsi). Riau :UIN Sultan Syarif Kasim.

Ramadani, Mirza.2019.*Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Tahap III Di Kabupaten Ogan Ilir*. (Skripsi). Ogan Ilir :Universitas Sriwijaya.

Riant D. Nugroho.2020.*Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia.Hal, 216.

Sonia Gusti Mauliza.2019. *Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Pesawaran*.(skripsi).Bandar Lampung :Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Sudjana. 2011. *Metode Penelitian*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sugiyono, Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Syahrudin,2019.*Implementasi Kebijakan Publik*.Bandung:Nusa Media

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air